

RURAL WOMEN AND GOVERNMENT POLICIES IN JAPAN

ABSTRACT

In Japanese farming system, most women are responsible for doing farm work in addition to household management. However, a fact that there are many problems regarding to their status and role must be observed. The objectives of this research were to identify: 1) the changes in status and role of rural women, 2) rural women's participation, and 3) the government policies to promote rural women's participation in Japan.

The research was conducted using basic descriptive-analytical method. Japan was chosen as a studied area by purposive method. The analysis methods used in this research were table analysis and simple regression analysis.

The results showed that rural areas in Japan currently face many problems, such as the decrease in cultivated land area, population and number of farm household and there exist traditional family system as known as "ie". Women's status and roles in agriculture are increasing and it means that women play an important role in agriculture. Under "ie" system, women in farm households have no control over the money and have restriction in decision-making process. Women's participation in the decision-making process of agricultural and rural society is still low, but there has been a trend of progress toward change in recent years. Some government policies that have been implementing to achieve gender equality and promote participation and role of rural women: 1) The Cooperative Agricultural Extension Service is addressed to democratize Japanese rural society by changing the way of thinking and attitude of rural women to improve their life condition and status through group activities. 2) The Family Management Agreement; it has many possibilities for empowering women and making rural areas more attractive because it has the potency to secure true partnership for all members of farm families. The number of farm household executing Family Management Agreement is increasing, but still low. 3) Income Generating Activities is proposed to improve women's financial status, provide income for rural women and stimulate local economies. The number of enterprises by women in rural areas is increasing and ratio of women's group enterprise is bigger than individual woman enterprise.

Key words: rural women, status, role, participation and policies.

WANITA PERDESAAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI JEPANG

INTISARI

Dalam sistem pertanian Jepang, sebagian besar wanita bertanggung jawab melakukan pekerjaan bertani disamping pengelolaan rumah tangga. Tetapi, kenyataannya banyak permasalahan berkaitan dengan status dan peran wanita yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perubahan status dan peran wanita perdesaan, 2) partisipasi wanita perdesaan dan 3) kebijakan pemerintah untuk memajukan partisipasi wanita perdesaan di Jepang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dasar *descriptive* analisis. Jepang dipilih sebagai daerah penelitian dengan metode *purposive*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel dan regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah perdesaan di Jepang saat ini menunjukkan banyak permasalahan, seperti penurunan luas lahan yang ditanami, jumlah dan anggota rumah tangga tani dan adanya sistem keluarga tradisional yang dikenal dengan "ie". Status dan peran wanita dalam pertanian meningkat dan ini berarti wanita memainkan peran penting dalam pertanian. Di bawah sistem "ie", wanita dalam rumah tangga tani tidak memiliki kendali terhadap uang dan memiliki keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan pertanian dan kehidupan bermasyarakat masih rendah, namun ada kecenderungan perubahan. Beberapa kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan gender dan memajukan partisipasi dan peran wanita perdesaan adalah: 1) *The Cooperative Agricultural Extension Service* ditujukan untuk mendemokratisasikan masyarakat perdesaan Jepang dengan merubah pola fikir dan sikap wanita perdesaan melalui kegiatan kelompok 2) *The Family Management Agreement*; kebijakan ini memiliki banyak peluang untuk memberdayakan wanita dan membuat daerah perdesaan menjadi lebih menarik karena adanya potensi untuk menjamin kerja sama yang baik bagi semua anggota keluarga tani. Jumlah rumah tangga tani yang melaksanakan *Family Management Agreement* meningkat, tetapi masih rendah 3) *Income Generating Activities* ditujukan untuk meningkatkan status keuangan wanita, menyediakan pendapatan bagi wanita perdesaan dan mendorong perkembangan ekonomi wilayah. Saat ini, jumlah kegiatan usaha oleh wanita di daerah perdesaan meningkat dan perbandingan jumlah kelompok kegiatan usaha wanita lebih besar daripada kegiatan usaha perorangan.

Kata kunci: wanita perdesaan, status, peran, partisipasi dan kebijakan.